

# Ganti Rugi Warga Sei Gong Mulai Disalurkan

**BATAM** - Pemerintah pusat melalui Badan Pengusahaan (BP) Batam menyalurkan uang kerohiman untuk warga yang menggarap lahan dan memilik bangunan di Sei Gong, Barelang. Nominal dana yang disalurkan bervariasi. Tergantung dari banyak tanaman dan jenis serta kondisi bangunannya. Bahkan, ada yang dapat Rp800 juta untuk satu orang. Untuk tahap awal, dana yang disalurkan tercatat untuk sembilan warga.

Penyaluran ini sendiri dilakukan, Rabu (9/5) dengan sistem transfer, setelah warga menandatangani serah terima. "Dari 46 orang yang berhak menerima, sembilan orang sudah



F-ISTIMEWA

**MENTERI PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau Dam Sei Gong, beberapa waktu lalu.**

mendapat uang saku hati atau kerohiman. Ada satu orang yang mendapat Rp 800 juta. Ada juga yang mendapat Rp200 juta,"

beberapa Deputi IV BP Batam, Eko Budi Soepriyanto.

Total dana yang disiapkan pemerintah pusat, sebanyak Rp3 miliar, untuk

uang kerohiman bagi warga yang melakukan aktivitas di atas lahan dam itu. Diakui, ada 78 persil lahan diusahakan warga. Namun, yang berhak menerima uang kerohiman, hanya 46 orang.

"Pemberian uang kerohiman ini masih akan dilanjutkan minggu depan," jelas Eko.

Menurutnya, pemberian uang kerohiman ini akan diberikan untuk warga yang sudah membawa dokumen kartu keluarga (KK) dan KTP. Selain itu, harus membawa hasil verifikasi yang dilakukan tim atas tanaman dan bangunan di lahan Sei Gong.

"Silakan yang lain datang dan kita terima mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB," imbaunya. (mbb)

# RKB Mesti Diperbanyak di Sistem Zonasi

MARTUA,  
Batam

RENCANA penerapan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) atau Penerimaan Siswa Baru (PSB) tingkat SMP mendapat apresiasi dari DPRD Batam. Namun, sistem zonasi harus diiringi dengan penambah kelas baru dan sekolah baru. Tanpa itu, dikhawatirkan akan memunculkan permasalahan baru saat PSB.

Sekretaris Komisi IV DPRD Batam, Udin P Sihaloho mengatakan, sistem zonasi akan memudahkan biaya transportasi. Namun, sebelum diterapkan, Pemko Batam diminta menambah gedung sekolah dan Ruang Kelas Baru (RKB), terutama untuk SMP. "Saya setuju saja sistem zonasi. Hanya saja, memungkinkan nggak. Harus lihat dilapangan," katanya.

Menurut Udin, sistem zonasi harus dibarengi dengan ketersediaan ruang kelas. Tanpa itu, maka akan menimbulkan permasalahan baru. "Harus ada kelas baru yang mumpuni dalam menampung siswa/siswi baru. Tanpa itu, akan menimbulkan gejolak baru. Jumlah sekolah dan penduduk harus seimbang," pesannya.

Dikhawatirkan, permasalahan akan memunculkan penumpukan pendaftar disekolah dengan lingkungan padat, namun ruang kelas sekolah negeri terbatas. "Karena ada satu kecamatan hanya ada satu sekolah negeri. Ini akan menimbulkan masalah penumpukan pendaftar," himbaunya.

Dengan kondisi saat ini, diperkirakan akan banyak anak didik yang tidak terakomodir di sekolah terdekat dengan tempat tinggal. "Kalau untuk kondisi saat ini, sistem zonasi masih lebih tepat diterapkan di *hinterland*," pesan Udin.

Alasannya lebih tepat untuk saat ini sistem zonasi di *hinterland*, karena antara sekolah dan calon siswa yang masih rendah. "Kalau Sagulung dan Batuaji, ini akan masalah. Kecamatan berdekatan dan dipisah jalan. Warga Sagulung tidak bisa sekolah di Batuaji yang diseberang rumahnya. Ini baiknya dibuat test terbuka saja," imbaunya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan, Hendri Arulan mengatakan, sistem zonasi akan diberlakukan tahun 2018. Aplikasi untuk sistem itu, akan disiapkan, karena terjadi perubahan sistem PPDB. "Tahun lalu kan



SUASANA penerimaan siswa baru di salah satu SMA Negeri di Batam tahun lalu.

sistem rayon. Tahun ini berdasarkan zonasi. Jadi aplikasinya juga buat baru," katanya.

Direncanakan, aplikasi ini nantinya dapat diunduh di *Playstore* untuk telepon genggam berbasis Android.

Sehingga pelaksanaan PPDB secara daring tetap bisa berjalan. Dengan sistem zonasi, siswa yang berdomisili di sekitar sekolah wajib diterima di sekolah tersebut. Sistem ini dipakai dengan tujuan agar

tidak ada siswa yang bersekolah jauh dari rumah.

"Dengan sistem ini, meskipun di kecamatan hanya ada satu sekolah negeri, warganya bisa tetap sekolah di kecamatan terdekat. Misal di Lubukba-

ja, cuma ada satu SMP negeri, yang rumahnya di ujung-ujung, bisa sekolah di Batuampar," jelasnya.

Untuk menyosialisasikan sistem zonasi dan daring ini, dalam waktu dekat pihaknya akan mengadakan

pertemuan dengan sekolah-sekolah.

"Kita akan sosialisasikan sistem ini dalam waktu dekat. Aplikasinya juga dalam proses pembuatan. Kita harap segera selesai," ujarnya. \*\*\*

F-DOKUMENTALJUNGPIHANG POS